

## Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru

**Firda Ayuni Safyentri**

Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: [firdaayuni.19@gmail.com](mailto:firdaayuni.19@gmail.com)

**Mimin Sundari Nasution**

Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: [mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id](mailto:mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id)

Korespondensi penulis: [firdaayuni.19@gmail.com](mailto:firdaayuni.19@gmail.com)

**Abstract:** *This research is motivated by the continued inability of the people of Pekanbaru City to finance health services for their families and themselves, where health is fundamental in meeting life's needs. Therefore, the Pekanbaru City Health Service created an innovative health insurance program to achieve Universal Health Coverage (UHC) which was named Pekanbaru Bertuah Health Insurance to make it easier for the people of Pekanbaru City to access health to improve the welfare of the people of Pekanbaru City. Pekanbaru Bertuah Guarantee is a health insurance service that is free of charge only by using an ID card for those domiciled in Pekanbaru City. The aim of this research is to find out how the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program is implemented. The method used in this research is a qualitative research method. With data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program carried out by the Pekanbaru City Health Service is not optimal, this can be proven by the existence of several obstacles found in implementing the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program, namely that there are still many people who do not know about the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program. Many people have not been able to register for the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program and the collaboration between the Pekanbaru City Health Service and hospitals is not yet comprehensive.*

**Keywords:** *Implementation, Program, Pekanbaru Guarante*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak ketidakmampuan masyarakat Kota Pekanbaru dalam membiayai layanan kesehatan bagi keluarga serta dirinya yang dimana kesehatan merupakan hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru membuat suatu inovasi program jaminan kesehatan dalam mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* yang diberi nama Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah guna memudahkan masyarakat Kota Pekanbaru dalam mengakses kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Jaminan Pekanbaru Bertuah ini merupakan pelayanan jaminan kesehatan yang tidak dipungut biaya hanya dengan menggunakan KTP yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan Program Jaminan Pekanbaru Bertuah yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah, masih banyak masyarakat yang belum bisa mendaftar Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah serta kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan rumah sakit belum secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program, Pekanbaru Bertuah

### PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak setiap warga negara Indonesia yang telah diatur di dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga

negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak ada perbedaan atau perlakuan khusus bagi setiap warga negara untuk dapat memperoleh akses kesehatan, tidak diukur dari status sosial maupun status ekonominya, seluruhnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk akses kesehatan. Melihat urgensi dari kebutuhan akan kesehatan inilah, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses kesehatan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali.

Mengingat pentingnya akses kesehatan ini dijadikan dasar prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun telah dicanangkan bahwa kesehatan merupakan prioritas dalam RPJMN, pada kenyataannya masyarakat miskin dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Yang dimana tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan ekonominya untuk dapat membiayai pelayanan kesehatan. Hal tersebut membuat pemerintah perlu memberikan perhatiannya sehingga masyarakat miskin juga mendapatkan perlindungan akses kesehatan.

Tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat yang berkewajiban menyejahterakan warganya, melainkan juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah khususnya. Terdapat beberapa akibat dari rendahnya kesehatan masyarakat, diantaranya akan berdampak pada produktivitas kerja yang menurun dan juga turunnya angka kesehatan masyarakat sehingga akan menjadi beban bagi pemerintah. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah sehingga tercipta produktivitas kerja yang mumpuni bagi sumber daya manusia di Indonesia.

Selain tercantum dalam Pasal 28 H UUD 1945, peraturan mengenai akses kesehatan masyarakat terkhusus jaminan kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa pemerintah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan mematok target *Universal Health Coverage (UHC)* yang akan tercapai dalam jangka waktu lima tahun terhitung 2019-2024. *Universal Health Coverage (UHC)* menurut *World Health Organization (WHO)* adalah menjamin semua orang mempunyai akses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya. Lebih lanjut WHO juga mengingatkan bahwa:

- UHC bukan jaminan kesehatan tak terbatas atau pengobatan gratis.
- UHC bukan semata tentang pembiayaan kesehatan, namun mencakup pengelolaan semua komponen sistem kesehatan.
- UHC bukan hanya terbatas pada pembiayaan layanan kesehatan dasar minimal, namun harus meningkatkan cakupan pada saat sumber daya sudah makin baik.
- UHC bukan hanya mencakup kesehatan perorangan, namun mengupayakan kesehatan masyarakat termasuk promosi kesehatan, penyediaan air bersih, pengendalian nyamuk, dsb.
- UHC bukan hanya mengenai peningkatan kesehatan, namun juga langkah menuju ekuiti, prioritas pembangunan, serta inklusi dan kohesi sosial.

UHC ini bukan hanya untuk penduduk yang telah menjadi peserta JKN tapi juga berkaitan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menargetkan tahun 2030 tidak ada seorang pun yang tidak menikmati hasil pembangunan berkelanjutan. Jadi, bila seluruh penduduk Indonesia yang sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa terkendala biaya dan juga untuk masyarakat yang kurang mampu yang tidak terdaftar di Jaminan Kesehatan seperti KIS atau BPJS. Dengan UHC tersebut pemerintah mewajibkan bagi setiap warga negaranya untuk menjadi peserta dan terlindungi oleh asuransi kesehatan nasional. UHC ini tentunya bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan dan menciptakan derajat kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia. UHC ini juga perlu didukung oleh pemerintah daerah yang terus menggenjot angka kepesertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan.

Di Provinsi Riau ada 10 pemerintah kabupaten/kota yang telah bersinergi dalam menjalankan UHC adalah Kabupaten Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Kota Pekanbaru. Tinggal 2 daerah lagi yang belum yakni Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Kota Pekanbaru pun turut proaktif dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi warganya. Bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, telah resmi dibentuk Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah dalam mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) pada tanggal 28 Juli 2023 dan telah diatur dalam Peraturan Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan serta Surat Keputusan Walikota No 544 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023. Terbentuknya Program Pekanbaru Bertuah ini di dasari karena masih banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan jaminan kesehatan karena masih rendahnya tingkat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan bidang kesehatan.



**Gambar 1 Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Di Kota Pekanbaru Tahun 2023**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun, 2023

Berdasarkan gambar 1.1 yang didapatkan oleh peneliti, dengan keterangan PBI APBN (Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBN), PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD/JAMKESDA), PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan BP (Bukan Pekerja) ada 1.078.330 jiwa dari total penduduk Kota Pekanbaru yaitu 1.107.327 jiwa telah mencapai target 97,38 persen untuk mencapai UHC sehingga Kota Pekanbaru dapat membentuk Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Dari total penduduk yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan tersebut, ada 28.997 jiwa yang belum mengetahui adanya Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini. Dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Program Jaminan Kesehatan tersebut sehingga diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru lebih melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar seluruh masyarakat Kota Pekanbaru mendapatkan akses jaminan kesehatan Pekanbaru Bertuah ini. Seperti hakikat Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah pada umumnya, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga miskin, melainkan seluruh warga yang tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan yang dimana berobat gratis hanya dengan menggunakan e-KTP Kota Pekanbaru yang berstatus online. Dengan program ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pelayanan di Rumah Sakit yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru. Program Jaminan Pekanbaru Bertuah yang diterapkan di Kota Pekanbaru selain bertujuan meningkatkan taraf kesehatan warga Pekanbaru juga menjadi sebuah bentuk partisipasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurangi defisit BPJS Kesehatan. Karena dengan adanya program ini, masyarakat yang belum ter-cover oleh JKN akan didaftarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan dibiayai APBD Kota Pekanbaru dengan syarat-syarat tertentu. Namun tentunya dalam pelaksanaan tersebut terdapat kendala yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru agar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Provinsi Riau agar dapat terwujud dengan baik.

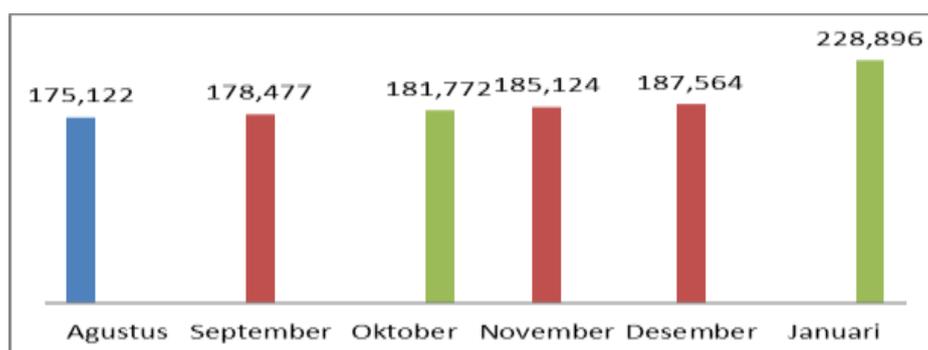
Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah sendiri telah diberlakukan di Kota Pekanbaru pada 28 Juli 2023 oleh Walikota Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sehingga seluruh warga Kota Pekanbaru dapat mengakses pelayanan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan

Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Ada 21 Puskesmas dan 28 Rumah Sakit yang diantaranya 8 Rumah Sakit Pemerintah dan 20 Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai Implementor dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah.

Dinas Kesehatan harus melakukan *crosscheck* data dengan pihak-pihak rumah sakit serta puskesmas yang juga selaku pelaksana program ini agar bisa didapatkan penyamaan data sehingga informasi mengenai kasus yang terjadi dapat diperoleh dengan akurat dan datanya tidak rancu. Kemudian pada poin sumber daya yang mendukung kebijakan baik dari segi sumber daya manusia serta sumber daya finansial pada implementasinya sumber daya manusia sudah terbilang cukup baik dikarenakan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program ini sendiri cukup responsif dan cekatan dalam menangani pasien yang ingin mendaftar maupun mengakses program ini sesuai dengan tupoksinya. Selain itu, fasilitas yang disediakan dalam mendukung terselenggaranya program ini di Puskesmas maupun Rumah Sakit yang ditunjuk juga dirasa cukup memadai oleh para penerima Jaminan Pekanbaru Bertuah.

Untuk hal komitmen, menurut data yang didapat baik dari hasil wawancara maupun sumber pustaka atau berita yang didapat oleh penulis, bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki komitmen yang cukup kuat dalam menyukseskan program ini. Hal tersebut dikarenakan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menuturkan terdapat 95,27% penduduk Kota Pekanbaru yang telah di-*cover* oleh program ini dari target awal yang ditetapkan yakni 95%.

Berikut adalah jumlah peserta yang mengikuti Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru :



**Gambar 2 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023 – 2024**

*Sumber : BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024*

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah peserta yang mendaftar Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini. Dapat dilihat bahwa masyarakat sangat membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Namun, masih saja terdapat kendala dalam program ini yakni masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi secara langsung oleh Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit dan Puskesmas terkait program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini.

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum secara menyeluruh yang dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa program ini hanya bisa digunakan pada Rumah Sakit Pemerintah serta Puskesmas saja, padahal program ini dapat digunakan pada setiap Rumah Sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk memudahkan masyarakat Kota Pekanbaru dalam mengakses Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berencana untuk mengembangkan halte busway ke setiap Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru.

Untuk memudahkan masyarakat Kota Pekanbaru dalam mendapatkan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini masyarakat terlebih dahulu wajib untuk mendaftarkan dirinya dengan memenuhi syarat serta mengikuti alur pendaftaran peserta Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini. Berikut adalah syarat serta alur pendaftaran Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah :

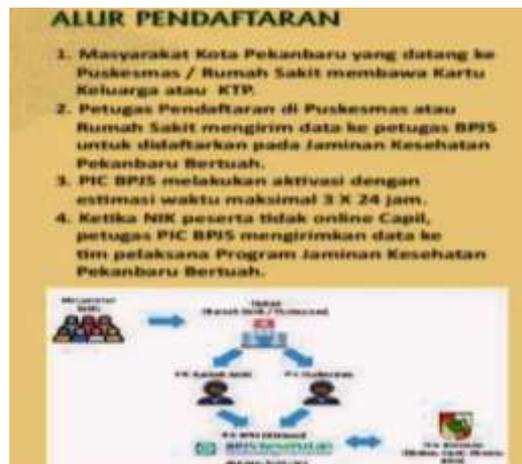


**Gambar 3 Syarat Pendaftaran Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2023*

Berdasarkan gambar 3 mengenai syarat pendaftaran peserta, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sudah memudahkan persyaratan pendaftaran peserta agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mendaftarkan dirinya sebagai peserta. Tetapi, tetap saja adanya kendala dari masyarakat, yaitu masih belum efisiennya waktu dalam menjadi peserta program.

Dengan terpenuhinya persyaratan diatas, masyarakat dapat mendaftar sebagai anggota Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah. Berikut adalah alur pendaftaran peserta Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah :



**Gambar 4 Alur Pendaftaran Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2023*

Namun ditemukan kembali permasalahan yang muncul setelahnya yaitu berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama Kepala Bidang Pelayanan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, yakni masih banyak masyarakat yang belum dapat mendaftar sebagai peserta program dikarenakan kendala peserta yang ingin mendaftar tersebut belum melakukan perekaman e-KTP sehingga belum bisa mendaftar sebagai peserta program. Dari seluruh jumlah total masyarakat Kota Pekanbaru hanya 769.022 masyarakat yang sudah melakukan perekaman e-KTP dan juga masih adanya masyarakat yang mengakui berdomisili Kota Pekanbaru tetapi di KTP berdomisili diluar Kota Pekanbaru dikarenakan belum melakukan pembaruan data kependudukannya. Dengan berbagai kendala diatas yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tersebut sehingga pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan lebih baik dalam menangani kendala tersebut dengan bekerjasama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Jika masyarakat yang telah terdaftar sesuai dengan syarat serta alur pendaftaran diatas, maka masyarakat tersebut sudah bisa mengakses Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini. Program ini dapat digunakan baik pada rawat inap pada kelas 3 maupun rawat jalan disetiap puskesmas dan rumah sakit yang telah terdaftar dengan masa aktif 1 tahun. Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini melayani 144 layanan kesehatan gratis yang dimana penyakit ringan dapat berobat di Puskesmas dan penyakit berat dapat langsung datang ke Rumah Sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini, pemerintah berharap program ini akan sangat membantu seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dalam bidang kesehatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan kesehatan tersebut dalam membuat kualitas masyarakat Kota Pekanbaru lebih terjamin.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah karena kurangnya sosialisasi secara langsung oleh implementor.
2. Masih banyak masyarakat yang belum bisa mendaftar Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah karena masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang belum melakukan perekaman e-KTP.
3. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Rumah Sakit belum secara menyeluruh sehingga masyarakat belum mengetahui dimana saja program ini digunakan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan itu karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mencapai suatu perubahan (Winarno, 2008).

### **Pengertian Implementasi Program**

Program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama. Bahwa program adalah suatu rancangan usaha yang dilakukan dengan adanya tujuan yang akan dicapai. Suatu program memiliki komponen yang dapat saling menunjang pelaksanaan. Menurut (Yusuf, 2008) dalam Joan L. Herman mengemukakan bahwa program adalah segala sesuatu yang dicoba dan dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Menurut Hans Hochholzer dalam Hasanah (2021) program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang diterapkan.

### **Pengertian Jaminan Kesehatan**

Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, di samping jaminan sosial lainnya seperti jaminan ketenagakerjaan dan jaminan

pendidikan bagi masyarakat. Jaminan sosial merupakan sebuah sistem perlindungan sosial untuk masyarakat. Menurut (Sulastomo, 2008) jaminan sosial adalah suatu sistem untuk menjamin penghasilan ketika seseorang menghadapi risiko kehidupan seperti sakit, bersalin, cedera akibat pekerjaan, pengangguran, kesendirian, usia tua dan kematian, penyediaan perawatan medis dan pemberian subsidi untuk keluarga yang memiliki anak-anak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Menurut Arikunto (2018) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Menurut Bungin (2010) menjelaskan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai suatu kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini mencari dan menemukan data yang dalam keadaan alamiah atau seharusnya serta tidak diubah menjadi angka, melainkan dalam bentuk kalimat. Sehingga, penelitian ini memberikan gambaran secara langsung dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kota Pekanbaru terlihat bahwa masyarakat (pengguna program) terbantu dengan adanya Program Pekanbaru Bertuah ini karena bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, namun yang menjadi kendala atau permasalahan yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah, masih banyak masyarakat yang belum bisa mendaftar Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah serta kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Rumah Sakit belum secara menyeluruh.

Dengan adanya ditemukan masalah diatas yang terkait dengan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah yang menyulitkan proses pelaksanaan implementasi program. Hal ini memerlukan tanggapan, penanganan, dan penyesuaian dalam pelaksanaan program untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program secara maksimal agar program ini dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama.

### **Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah**

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah, dalam hal ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones yang terdiri dari 3 indikator, yaitu :

1. Pengorganisasian
2. Interpretasi
3. Aplikasi atau Penerapan

Ketiga aspek diatas merupakan poin untuk menilai program yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan sekaligus yang bertanggung jawab atas program ini sama seperti yang diharapkan atau berdasarkan teori implementasi program yang penulis gunakan sebagai berikut :

#### **Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan rencana dan metode dalam upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan menjadi suatu kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Organisasi yang mendirikan atau mengatur suatu unit, prosedur dan sumber daya untuk menghasilkan efek atau hasil. Kegiatan organisasi inilah yang mengatur ulang sumber daya, unit, dan prosedur yang menghasilkan untuk menerapkan suatu kebijakan sebagai hasil yang sesuai dengan tujuan dan target kebijakan.

Organisasi yang dimaksud yaitu pembentukan dan penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Dalam hal ini, program yang dilaksanakan harus memiliki struktur organisasi atau birokrasi yang jelas dan teratur. Indikatornya yaitu :

1. Struktur organisasi program.

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu program. Sumber daya yang diperlukan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang disediakan oleh implementor. Para implementor atau pelaksana diharapkan dapat menjalankan program yang dibuat dengan baik dan jelas. Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini implementor serta pelaksana terampil dan

memiliki pengetahuan terkait program. Dan para pegawai memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya.

## 2. Sumber Daya Manusia dalam organisasi.

Dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki sejumlah pegawai dibidangnya yang diberi nama Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Berikut adalah jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dibidang Jaminan Kesehatan :

**Tabel 1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Bidang Pelayanan Jaminan Kesehatan**

NO	Tingkat Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4
2	Verifikator	6
3	THL	2
	Jumlah	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Bidang Pelayanan Jaminan Kesehatan berjumlah 12 orang. Tetapi masih adanya kendala yang terjadi di masyarakat yaitu masih terjadinya kendala mengenai pada proses pendaftaran peserta. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pendaftaran peserta program serta masih terbatasnya petugas layanan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah.

Walaupun dengan begitu, ternyata masih terjadi kendala terhadap sumber daya pada implementor, yaitu pada bagian verifikator. Bagian verifikator ini masih membutuhkan sumber daya yang lebih agar masyarakat yang ingin menanyakan informasi atau melaporkan kendala dari program Pekanbaru Bertuah ini lebih efektif. Pada proses implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini para petugas sudah dibekali ilmu pengetahuan tambahan pada saat terjun langsung kelapangan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki ilmu pengetahuan yang luas.

## 3. Sumber Daya Finansial dalam pelaksanaan program.

Ditinjau dari segi anggaran, segala kegiatan dananya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dana yang telah dibayarkan ini harus dimanfaatkan sebaik-sebaiknya dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah.

Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang diinstruksikan kepada seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Pekanbaru untuk

melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dengan harapan dapat tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu tidak dapat berobat di rumah sakit atau puskesmas serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru.

#### 4. Dukungan Pemerintah atau instansi serta masyarakat.

Dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini memberikan dampak positif baik kepada masyarakat maupun pemerintah serta swasta lainnya. Banyak dukungan positif yang diberikan kepada Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah.

#### 5. Motivasi Dilaksanakan Program.

Dengan adanya partisipasi dari tim pelaksana maupun dari masyarakat tersebut, maka muncullah dorongan atau motivasi yang membuat implementor dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain dari implementor, para pelaksana program juga memberikan penjelasan terkait dengan wawasan yang dimiliki oleh petugasnya.

### **Interpretasi**

Interpretasi sejalan dengan tujuan pembentukan kebijakan yang memiliki strategi yang dikembangkan dengan baik. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat pelaksana dapat menyadari berbagai hal, termasuk isi program, makna program dan tujuan program, serta bagaimana pelaksana dapat mempertahankan sikap teliti, konsisten serta tanggung jawab terhadap program ini. Para pelaksana harus mampu dan bisa menjalankan program kebijakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam hal ini, program kebijakan harus memiliki petunjuk teknis dan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman oleh pelaksana program, terdapat indikatornya yaitu:

#### 1. Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat

Mengenal komunikasi antar badan pelaksana dan komunikasi pelaksana dengan masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu program. Penyaluran komunikasi yang efektif maka akan memperoleh implementasi yang efektif pula. Komunikasi yang dimaksud yaitu mengadakan diskusi antara Dinas Kesehatan dengan tim pelaksana yang lain, yaitu BPJS Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas Kota Pekanbaru. Hal ini bertujuan untuk membicarakan mengenai implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini misalnya bagaimana pelaksanaan program dan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan program ini serta berapa target yang harus dicapai, dan juga bentuk sosialisasi seperti apa yang harus dilakukan.

Dalam implementasi program ini, pihak Dinas Kesehatan bersama seluruh tim pelaksana mengadakan sosialisasi guna mengajak masyarakat Kota Pekanbaru khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk menjadi peserta program. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan sosialisasi ke setiap Rumah Sakit serta Puskesmas, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta menyebarkan program melalui media cetak maupun media sosial.

Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat yaitu dibuktikan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat dalam upaya menjelaskan yang terkait Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini.



**Gambar 1 Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023**

*Sumber : Olahan Peneliti, 2023*

Gambar diatas merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh RSD Madani, Puskesmas Sidomulyo, Pemerintah Kota Pekanbaru beserta Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sosialisasi yang dilakukan antara lain menyebarkan pamflet, menyebarkan informasi melalui sosial media dan yang terakhir Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program dan mendukung upaya peningkatan UHC Kota Pekanbaru.

## 2. Kesesuaian pelaksana dan peraturan.

Selanjutnya yaitu membahas kesesuaian pelaksanaan dan peraturan. Para implementor melaksanakan program ini sesuai dengan pedoman yaitu Surat Keputusan Walikota Nomor 543 Tentang Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah, peraturan ini menyatakan bahwa implementor yang melaksanakan interpretasi ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Penduduk Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah yaitu setiap rumah sakit dan puskesmas Kota Pekanbaru dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage*. Sedangkan tata cara penyampaian pendaftaran program yang dilakukan oleh tim pelaksana juga tercantum Surat Keputusan Walikota Nomor 543. Untuk pelaksanaan program yang diperuntukkan kepada masyarakat serta alur pendaftaran dan juga syarat pendaftaran peserta tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 544 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023.

Gambar diatas merupakan peraturan yang menjadi pedoman bagi para implementor atau pelaksana Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Pekanbaru disaat membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru membentuk program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini.

### **Aplikasi atau Penerapan**

Penerapan adalah pelaksanaan dari semua tindakan yang diperlukan untuk pencapaian semua tujuan kebijakan. Sebuah penerapan yang dinamis atau prosedur implementasi membutuhkan arah pelaksana ke programnya tersendiri.

Kebijakan program harus melihat faktor seperti objektivitas, efektifitas, dan efisiensi. Pada aspek ini, peneliti ingin mengetahui apakah Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah akan berhasil diterapkan sesuai dengan prosedur kerja yang jelas, dan dengan program ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kelompok sasaran dan memunculkan respon apakah diterima atau tidak serta melihat tantangan dari aktivitas program.

Indikatornya yaitu :

1. Kesesuaian pekerjaan yang dilakukan.

Saat proses pengaplikasian/penerapan maka implementor harus melakukan tugas sesuai dengan pedoman dalam menjalankan program. Adapun pedoman yang ditetapkan dalam pelaksanaan program ini yaitu Surat Keputusan Walikota Nomor 543 Tentang Tim Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023. Berikut adalah tugas yang harus dilakukan oleh implementor program sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 543 Tentang Tim Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023 :

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah.
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah.
3. Mengalokasikan dan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional kepada seluruh penduduk yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Segmen PBPU dan BP Pemda.
4. Menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Melakukan verifikasi dan validasi data segmen PBPU dan PB Pemda untuk dapat diusulkan menjadi peserta PBI JK APBN.

Dari pedoman tersebut yaitu para implementor melaksanakan program agar tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan.

Untuk mengatasi masalah diatas guna mendukung pelaksanaan dalam Program Jaminan Pekanbaru Bertuah, maka peneliti menanyakan bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

2. Mengidentifikasi manfaat program serta apakah program diterima atau tidak oleh masyarakat.

Masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah akan merasakan manfaat dari program ini.

Pada rumah sakit tersendiri berdampak pada bidang pelayanan dan administrasi rumah sakit tersebut. Dengan adanya program ini, menjadikan tugas utama bagi setiap rumah sakit dan puskesmas agar memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik, serta dalam hal administrasi agar setiap para petugas lebih cekatan dalam perihal mengurus administrasi.

### **Hambatan Yang Terjadi Saat Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah**

Dalam proses implementasinya pelaksanaan program kurang berhasil karena sejumlah kendala, sementara tantangan lain muncul selama program ini berjalan, berikut hambatan yang terjadi :

#### **1. Pemutakhiran Data Peserta di BPJS Kesehatan**

Pemutakhiran data adalah proses memperbarui informasi yang ada dalam suatu basis data agar tetap akurat dan relevan. Pemutakhiran data peserta yang dimaksud adalah peserta yang sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan bila ingin menjadi anggota Jaminan Pekanbaru Bertuah harus melakukan pembaruan data terlebih dahulu kepada pihak BPJS. Pemutakhiran ini sangat penting karena untuk memastikan informasi data peserta yang sesuai dan juga agar peserta yang ingin menjadi anggota Jaminan Pekanbaru Bertuah tidak terdaftar dalam jaminan kesehatan lainnya.

#### **2. Permasalahan Dalam Pendaftaran Peserta Program Karena NIK atau e-KTP Belum Terdaftar Online di Capil**

NIK adalah nomor identitas kependudukan dalam kartu tanda penduduk. Dalam program ini diharuskan kepada masyarakat yang ingin mendaftar menjadi peserta harus memiliki NIK atau e-KTP yang sudah terdaftar online pada disdukcapil Kota Pekanbaru.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru, maka berikut penulis uraikan kesimpulan dan saran, antara lain :

1. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator menurut Charles O. Jones yaitu, pertama pengorganisasian dimana dalam hal ini terjadi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran peserta.. Kedua, indikator interpretasi dimana sosialisasi yang dilakukan oleh implementor serta tim pelaksana belum efektif karena masih adanya masyarakat yang belum mengetahui mengenai program ini. Ketiga, indikator penerapan yang dimana masih adanya masyarakat yang gagal dalam proses pendaftaran peserta program.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru adalah pemutakhiran data peserta di BPJS Kesehatan serta permasalahan dalam pendaftaran peserta dikarenakan terjadinya gagal proses pendaftaran akibat NIK atau e-KTP belum terdaftar di Capil.

### **Saran**

Para peneliti bertujuan untuk menyajikan dan mendefenisikan beberapa ide yang diantisipasi untuk menjadi masukan dan pertimbangan untuk penelitian berdasarkan hasil penelitian dan percakapan yang telah disebutkan.

Berikut saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu :

1. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru membentuk suatu rencana strategi seperti mengembangkan transportasi busway ke setiap Rumah Sakit serta Puskesmas di Kota Pekanbaru agar masyarakat Kota Pekanbaru dapat mudah mengakses Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru.
2. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru lebih memperhatikan waktu pendaftaran peserta Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru agar saat pendaftaran peserta program lebih efisien.
3. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bersama Rumah Sakit dan Puskesmas Kota Pekanbaru lebih melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dapat mengetahui adanya Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru secara merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Jurnal**

- Arikunto. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, Z., As'ad, M. U., & Akhmad, B. (2021). Program Kerja Sebagai Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang. *Jurnal Mahasiswa*, 1–13.
- Moleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sulastomo. (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional : Sebuah Introduksi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Prose*. PT. Buku Kita.
- Yusuf, F. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Rineka Cipta.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Surat Keputusan Walikota No 543 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Pekerja
- Peraturan Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah
- Surat Keputusan Walikota Nomor 544 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah Tahun 2023
- Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945